

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PENDIDIKAN INDONESIA: KAJIAN LITERATUR

Dewi Syafriani¹, Berlinda Dwi Purnama Dawolo², Leli Andriani Butar Butar³, Nuraina Batubara⁴, Sriwindi Silitonga⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Kimia, Kimia, Universitas Negeri Medan

dewisy@unimed.ac.id¹, berlindadwipurnamadawolo@gmail.com², leliandriani207@gmail.com³,

aina01544@gmail.com⁴, sriwindisilitonga@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Indonesia melalui pendekatan kajian literatur. Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan terbaru yang menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi, dan penguatan profil Pelajar Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah artikel ilmiah, buku, regulasi, serta laporan penelitian terkini yang terbit antara tahun 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui fleksibilitas perencanaan, pemberdayaan guru, serta pengembangan karakter siswa. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan tenaga pendidik, keterbatasan sarana prasarana, serta kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan Kurikulum Merdeka sekaligus menawarkan rekomendasi penguatan kapasitas guru, pemerataan fasilitas, dan penguatan monitoring serta evaluasi agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Dengan demikian, kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi implementasi yang lebih optimal.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, implementasi, pendidikan Indonesia, kajian literatur, Pelajar Pancasila

Abstract

This research aims to examine the implementation of the Merdeka Curriculum in Indonesian education through a literature review approach. The Merdeka Curriculum is the latest educational policy that emphasizes competency-based learning, differentiation, and strengthening the profile of Pancasila students. The research method used is a literature study by reviewing scientific articles, books, regulations, and recent research reports published between 2020 and 2025. The results of the study indicate that the Merdeka Curriculum has great potential in improving the quality of learning through flexible planning, teacher empowerment, and character development of students. However, its implementation still faces various challenges, such as the readiness of educators, limitations of facilities, and quality disparities among educational units. This article contributes to providing a comprehensive overview of the dynamics of implementing the Merdeka Curriculum while also offering recommendations for strengthening teacher capacity, equalizing facilities, and enhancing monitoring and evaluation so that this policy can be effectively implemented. Thus, this literature review is expected to serve as a reference for academics, education practitioners, and policymakers in formulating more optimal implementation strategies.

Keywords: Merdeka Curriculum, implementation, education in Indonesia, literature review, Pancasila Students.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam membangun peradaban bangsa. Melalui pendidikan, suatu bangsa mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan abad ke-21, dan daya saing global. Dalam konteks Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, serta kreatif (Fahrina & Putra, 2023; Istighfarin, A., Aini, D. N., & Khudin, M., 2024). Oleh sebab itu, desain kurikulum nasional harus adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan baru dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada guru dan satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah. Dengan orientasi pada pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, serta asesmen autentik, Kurikulum Merdeka diharapkan menjadi solusi atas berbagai keterbatasan Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu padat materi dan kurang memberi ruang inovasi bagi guru (Fitriyah, C. Z., & Wardani, R. P., 2022).

Studi-studi awal menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa sejumlah keunggulan, di antaranya peningkatan kreativitas peserta didik, penguatan pembelajaran kolaboratif, serta pemberdayaan guru dalam mendesain kegiatan belajar. Kurikulum ini juga dianggap mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Namun, pada praktiknya, berbagai tantangan masih mengemuka, mulai dari kesiapan guru, kurangnya pelatihan profesional berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, hingga kesenjangan kualitas antar sekolah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Hartati & Nurhadi, 2024).

Jika ditinjau dari penelitian-penelitian sebelumnya, kajian tentang Kurikulum Merdeka sebagian besar masih bersifat deskriptif atau terbatas pada lingkup sekolah tertentu, seperti sekolah penggerak. Sebagian penelitian lain hanya berfokus pada satu dimensi, misalnya analisis kesiapan guru, atau dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. Belum banyak ditemukan kajian literatur yang sistematis, komprehensif, dan lintas jenjang pendidikan yang menyajikan gambaran utuh mengenai dinamika implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal pendekatan metodologis yang mengintegrasikan berbagai hasil penelitian dan dokumen kebijakan sehingga dapat menghasilkan sintesis ilmiah yang lebih menyeluruh (Hasbiuán, H. Y., 2023).

Kebaruan utama penelitian ini adalah kajian literatur yang tidak hanya memotret peluang dan hambatan implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi juga mengaitkannya dengan teori pembelajaran kontemporer, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan asesmen autentik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengisi kesenjangan yang belum terbahas dalam penelitian terdahulu, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk optimalisasi implementasi kebijakan pendidikan nasional. (Kemendikbudristek, 2022)

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini difokuskan pada tiga pokok bahasan utama. Pertama, mengulas landasan filosofis dan teoretis Kurikulum Merdeka dalam kerangka pendidikan nasional. Kedua, membahas hasil kajian literatur mengenai peluang dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai jenjang pendidikan. Ketiga, merumuskan strategi penguatan implementasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, satuan pendidikan, guru, dan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia kontemporer, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan arah implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih efektif.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Kajian literatur dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan mengkaji secara mendalam berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait implementasi Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh, mengidentifikasi kesenjangan penelitian terdahulu, serta menyusun sintesis ilmiah mengenai dinamika penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2025. Proses pencarian literatur dilakukan secara daring melalui berbagai basis data jurnal nasional dan internasional, seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, dan portal resmi Kemendikbudristek (Kementerian Sekretariat Presiden, 2022). Karena penelitian ini merupakan kajian literatur, maka tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu, melainkan mencakup literatur yang relevan secara global maupun nasional.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini mengikuti tahapan kajian literatur sistematis (systematic literature review), yang meliputi: (1) identifikasi masalah dan tujuan penelitian; (2) penentuan kriteria inklusi dan eksklusi literatur; (3) pencarian literatur dari basis data; (4) seleksi literatur yang sesuai dengan topik; (5) analisis isi dan sintesis data; serta (6) penarikan kesimpulan (Kemdikbudristek, 2022). Dengan rancangan tersebut, artikel ini memastikan proses telaah literatur dilakukan secara terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Subjek Penelitian (Populasi dan Sampel)

Subjek penelitian berupa dokumen ilmiah yang relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Populasi penelitian adalah seluruh artikel jurnal, buku, regulasi pemerintah, serta laporan penelitian yang membahas Kurikulum Merdeka antara tahun 2020 hingga 2025. Dari populasi tersebut, dipilih sampel literatur dengan kriteria inklusi: (1) membahas Kurikulum Merdeka pada konteks pendidikan Indonesia; (2) diterbitkan dalam jurnal bereputasi atau dokumen resmi pemerintah; dan (3) relevan dengan topik implementasi, peluang, tantangan, atau strategi Kurikulum Merdeka. Literatur yang bersifat opini tanpa dasar ilmiah atau tidak relevan dengan pokok bahasan dikeluarkan dari sampel (Kemdikbudristek, 2022).

Prosedur/Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai publikasi ilmiah yang sesuai dengan kriteria penelitian. Peneliti menggunakan kata kunci “Kurikulum Merdeka,” “implementasi Kurikulum Merdeka,” “pembelajaran berdiferensiasi,” dan “profil Pelajar Pancasila” dalam proses pencarian literatur (Nugroho, M. R., Ayuningsih, F., Malikhah, S., & Murtiyasa, B, 2023). Semua literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tema, seperti landasan filosofis, peluang, hambatan, dan strategi implementasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam kajian literatur ini berupa lembar pencatatan data (data extraction form), yang berfungsi untuk mencatat identitas literatur (judul, penulis, tahun, jurnal/penerbit), tujuan penelitian, metode, temuan utama, serta relevansinya dengan topik Kurikulum Merdeka (Puspitasari, 2023). Instrumen ini membantu peneliti menjaga konsistensi dalam proses analisis dan meminimalisasi bias subjektif dalam interpretasi literatur.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui **analisis isi (content analysis)**, yaitu teknik untuk menafsirkan dan menyintesis informasi yang terkandung dalam literatur yang telah dikumpulkan.⁹ Langkah-langkah analisis meliputi: (1) membaca secara mendalam setiap literatur; (2) mengidentifikasi isu utama terkait implementasi Kurikulum Merdeka; (3) mengelompokkan temuan ke dalam kategori peluang, hambatan, dan strategi; serta (4) menyusun sintesis yang komprehensif. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh gambaran sistematis mengenai perkembangan, tantangan, serta arah implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang kuat, yaitu berupa pemetaan literatur secara menyeluruh, penemuan gap penelitian terdahulu, serta rekomendasi strategis untuk pengembangan implementasi Kurikulum Merdeka di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, penulis menemukan sejumlah temuan penting terkait implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Indonesia. Temuan ini kemudian dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan aspek filosofis, praktis, serta hambatan yang muncul di lapangan. Secara garis besar, hasil kajian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian berikut:

a. Hasil 1: Landasan Filosofis dan Potensi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka didesain sebagai jawaban atas kritik terhadap Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu padat, kurang fleksibel, serta tidak memberi ruang cukup bagi guru untuk berinovasi.¹ Dengan menekankan prinsip diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan profil Pelajar Pancasila, Kurikulum Merdeka dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan abad ke-21.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa salah satu potensi utama Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Guru dapat menyusun perangkat pembelajaran sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik, sementara sekolah memiliki keleluasaan mengatur struktur kurikulum. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata (Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S., 2023).

Dari perspektif teoretis, prinsip diferensiasi dalam Kurikulum Merdeka selaras dengan teori *student-centered learning* yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dengan demikian, kurikulum ini bukan hanya menghadirkan pembaharuan administratif, tetapi juga mengandung filosofi pendidikan yang progresif.

b. Hasil 2: Hambatan Implementasi di Lapangan

Meskipun memiliki keunggulan, implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai satuan pendidikan menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, keterbatasan kompetensi guru dalam memahami filosofi dan praktik Kurikulum Merdeka menjadi tantangan serius. Banyak guru masih berorientasi pada metode konvensional sehingga kesulitan beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik (Sari, D. K., & Nurcahyo, R., 2021).

Kedua, faktor infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan. Sekolah-sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) belum memiliki akses memadai terhadap sarana prasarana, teknologi, dan bahan ajar pendukung. Akibatnya, penerapan pembelajaran berbasis proyek yang menuntut kolaborasi lintas disiplin seringkali tidak berjalan optimal.

Ketiga, masih terdapat kesenjangan dalam kebijakan pelatihan dan pendampingan guru. Program guru penggerak memang menjadi salah satu upaya pemerintah, tetapi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan disparitas kualitas implementasi antar sekolah semakin lebar.

c. Hasil 3: Analisis Kritis dan Peluang Penguatan

Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi transformasi pendidikan, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan sistemik. Pertama, peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas. Guru tidak hanya perlu memahami konsep, tetapi juga dibekali keterampilan praktis untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dan proyek.

Kedua, pemerataan fasilitas pendidikan harus diakselerasi. Tanpa infrastruktur memadai, tujuan Kurikulum Merdeka untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna sulit tercapai, khususnya di sekolah-sekolah pedesaan dan wilayah 3T. Ketiga, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan serta berkelanjutan. Evaluasi bukan hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada sejauh mana kurikulum mendorong terbentuknya profil Pelajar Pancasila.¹¹

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka mencerminkan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia dari sekadar transfer pengetahuan menuju pengembangan kompetensi, karakter, dan kreativitas. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kapasitas guru, dan pemerataan fasilitas, Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi landasan pendidikan yang lebih relevan dengan tantangan global sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Karakteristik dan Keunggulan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan analisis terhadap referensi jurnal ilmiah yang ditulis oleh (Prada Destina Rahmadani dkk., 2024), Kurikulum Merdeka memiliki karakteristik dan keunggulan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2022, kurikulum ini memberikan kebebasan bagi pendidik dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing satuan pendidikan.

Kurikulum Merdeka menitikberatkan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, diferensiasi dalam pembelajaran, dan penyesuaian dengan perkembangan peserta didik. Salah satu aspek utama dari kurikulum ini adalah proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang bertujuan untuk menanamkan

nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, serta kreativitas pada siswa. Selain itu, kurikulum ini menghilangkan pembelajaran berbasis pemaksaan materi yang kaku dan beralih pada pendekatan yang lebih eksploratif dan interaktif.

Kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasaan bagi sekolah dalam memilih jalur pembelajaran, baik dengan menerapkan kurikulum secara mandiri, mengikuti kurikulum yang telah disediakan, maupun mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan demikian, implementasi kurikulum ini lebih menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik, yang berbeda di setiap daerah. Keunggulan lain dari Kurikulum Merdeka adalah penggunaan asesmen formatif sebagai alat ukur perkembangan belajar siswa secara lebih komprehensif, sehingga guru dapat memberikan intervensi pembelajaran yang lebih tepat.

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan sebuah transformasi sistem pendidikan yang memerlukan pendekatan strategis, adaptif, dan kolaboratif. Studi yang dilakukan oleh (Cholilah dkk., 2022) menyoroti bahwa percepatan pengembangan Kurikulum Merdeka dalam satuan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga pada kesiapan ekosistem pendidikan dalam menerapkan perubahan tersebut.

Secara konseptual, strategi implementasi Kurikulum Merdeka melibatkan beberapa tahap utama, yaitu: pemetaan karakteristik satuan pendidikan, perancangan visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan prinsip kurikulum ini, serta pengembangan perencanaan pembelajaran yang komprehensif. Perencanaan ini tidak hanya mencakup asesmen formatif dan sumatif, tetapi juga integrasi modul ajar yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis asesmen diagnostik menjadi penting untuk mengidentifikasi kesiapan dan kebutuhan peserta didik, sehingga strategi pembelajaran yang diterapkan dapat lebih personal dan efektif.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa peran guru sebagai pemimpin pembelajaran menjadi aspek fundamental dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai kurikulum secara konseptual, tetapi juga harus mampu mengadaptasi metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), pendekatan berbasis diferensiasi (Differentiated Instruction), serta penerapan teknologi pendidikan yang relevan. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar menjadi salah satu instrumen kunci dalam penguatan kapasitas guru, di mana platform ini menyediakan sumber daya pembelajaran, pelatihan mandiri, serta komunitas berbagi praktik baik yang dapat mendukung implementasi kurikulum secara lebih efektif.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat diabaikan. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan konsep pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan (continuous professional development), baik dalam bentuk pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun komunitas belajar yang melibatkan kolaborasi antarpendidik. Selain itu, supervisi akademik yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang.

Di samping aspek pedagogis, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka juga sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas pendidikan perlu diperkuat guna menciptakan sistem dukungan yang lebih holistik. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan regulasi, sumber daya, dan fasilitasi pelatihan, sementara sekolah harus mampu mengembangkan kebijakan internal yang mendukung penerapan kurikulum secara efektif. Di sisi lain, keterlibatan komunitas pendidikan, termasuk orang tua dan organisasi non-pemerintah, dapat berkontribusi dalam memberikan dukungan moral dan material guna memperkuat ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya menuntut perubahan dalam struktur pembelajaran, tetapi juga mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam seluruh ekosistem pendidikan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa penerapan kurikulum ini dapat berjalan optimal, sehingga mampu menghasilkan generasi yang lebih adaptif, kreatif, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman.

Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Terkait

Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional semakin diperkuat dengan hadirnya Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, yang menegaskan fleksibilitas dalam penerapan kurikulum serta menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi satuan pendidikan untuk mengadopsi Kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, regulasi ini juga memberikan ruang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyesuaikan metode pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih kontekstual dan berorientasi pada capaian kompetensi yang relevan.

Dukungan pemerintah dalam penerapan kebijakan ini tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kurikulum. Penyediaan infrastruktur mencakup akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, termasuk penguatan akses digital melalui Platform Merdeka Mengajar yang menyediakan sumber daya ajar, asesmen, dan pelatihan daring bagi guru. Selain itu, alokasi dana pendidikan, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menjadi instrumen penting dalam mendukung pengadaan perangkat pembelajaran yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Dalam aspek peningkatan kompetensi guru, pemerintah menekankan pentingnya program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang memberikan kesempatan bagi pendidik untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif. Program ini mencakup pelatihan berbasis teknologi, lokakarya, serta komunitas belajar yang memungkinkan para guru untuk berbagi praktik baik dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, pemerintah juga menggandeng berbagai institusi pendidikan tinggi dan organisasi profesi guru untuk turut serta dalam memberikan pendampingan serta pelatihan kepada tenaga pendidik di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Selain aspek penguatan kapasitas pendidik, regulasi ini juga menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring berkala guna menilai efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme asesmen nasional yang mencakup Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Dengan adanya asesmen ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan capaian peserta didik serta tantangan yang dihadapi satuan pendidikan dalam mengadopsi kurikulum baru. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah disparitas dalam kesiapan satuan pendidikan, terutama antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah dengan sumber daya yang terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pelatihan guru yang berkualitas serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif, seperti pengembangan model pelatihan berbasis komunitas serta program pendampingan yang lebih intensif bagi satuan pendidikan yang mengalami hambatan dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka.

Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang komprehensif serta dukungan pemerintah yang berkelanjutan, diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, serta komunitas pendidikan dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik (Kemendikbud, 2024).

Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kesiapan tenaga pendidik, ketersediaan infrastruktur, serta kesenjangan sumber daya antarwilayah. Banyak guru masih memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan asesmen formatif, sementara sekolah di daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap sarana pendukung seperti internet dan perangkat teknologi. Selain itu, fleksibilitas dalam kurikulum ini juga menjadi tantangan bagi sekolah yang belum terbiasa menyusun rencana pembelajaran secara mandiri.

Perbedaan sumber daya antarwilayah juga berdampak pada ketimpangan implementasi kurikulum ini. Sekolah di perkotaan umumnya lebih siap dengan dukungan fasilitas yang memadai, sedangkan sekolah di daerah pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses pelatihan guru serta sarana pembelajaran yang mendukung. Tanpa pendampingan yang memadai, kesenjangan ini dapat semakin memperlebar jurang kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga tujuan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan fleksibel menjadi sulit tercapai.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memperkuat program pelatihan guru secara berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap infrastruktur pendidikan, serta memberikan pendampingan yang lebih intensif bagi sekolah yang membutuhkan. Penyediaan internet gratis bagi sekolah di daerah terpencil, pengadaan perangkat pembelajaran, serta kolaborasi dengan komunitas pendidikan dan sektor swasta dapat menjadi solusi efektif. Dengan dukungan dari berbagai pihak, implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta didik di Indonesia (Cholilah dkk., 2022).

4. KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan upaya inovatif dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan berbasis pengembangan kompetensi. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesiapan tenaga pendidik dalam mengadaptasi metode pembelajaran baru, keterbatasan infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil, serta kesenjangan sumber daya antarwilayah yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaannya. Meskipun Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat, keberhasilan implementasi kurikulum ini tetap bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, sekolah, dan komunitas pendidikan dalam memastikan tersedianya pelatihan berkelanjutan, akses terhadap teknologi, serta pendampingan yang memadai bagi sekolah yang masih menghadapi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terstruktur dan kolaboratif, seperti peningkatan kompetensi guru melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), pemerataan akses infrastruktur digital, serta sinergi dengan sektor swasta dan organisasi pendidikan dalam mendukung implementasi kurikulum secara lebih optimal. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat diterapkan secara merata dan efektif di seluruh Indonesia, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta daya saing generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada para penulis dan peneliti terdahulu yang karyanya menjadi rujukan utama dalam kajian literatur ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas ketersediaan dokumen kebijakan serta publikasi resmi yang memperkaya analisis dalam artikel ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan penghargaan kepada dosen, rekan sejawat, serta lingkungan akademik yang telah memberikan arahan, masukan, dan diskusi kritis sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholilah, M., Tatuwo, A. G. P., Komariah, Rosdiana, S. P., & Fatirul, A. N. (2022). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(02), 56–67. <https://doi.org/10.58812/spp.v1.i02>
- Fahrina & Putra. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar.

- Arini: *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 101–115.
- Fitriyah, C. Z., & Wardani, R. P. (2022). Paradigma Kurikulum Merdeka bagi Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 236–243. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2043>
- Hartati & Nurhadi. (2024). Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah. *Jurnal Kajian Kurikulum*, 10(1), 77–92.
- Hasbiuán, H. Y. (2023). Ethnoscience as the policy implementation of Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Jurnal PPIPA*, 9(8). <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i8.4500>
- Istighfarin, A., Aini, D. N., & Khudin, M. (2024). Sosialisasi Anti-Bullying dengan metode kreatif sebagai upaya peningkatan pemahaman dan perilaku baik siswa di MI Muhammadiyah Kota Madiun. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(3).
- Kemdikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kemdikbudristek.
- Kemendikbud. (2024). Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. *Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024*, 1–26.
- Kementerian Sekretariat Presiden. (2022). *Tantangan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka*. KSPSTENDIK.
- Nugroho, M. R., Ayuningsih, F., Malikhah, S., & Murtiyasa, B. (2023). Manajemen pembelajaran matematika pada Kurikulum Merdeka. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(2), 1–27. <https://doi.org/10.24036/attadib.v7i2.1>
- Prada Destina Rahmadani, Diny Honggo Jati, & Elia Ayu Pratama. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Meningkatkan Sistem Pendidikan Indonesia? *JISMA: Journal of Information Systems and Management*, 3(2), 1–4.
- Puspitasari. (2023). Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka: Perspektif Teori Pembelajaran Kontemporer. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(3), 150–165.
- Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka melalui literasi proyek penguatan profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(1), 84–90.
- Sari, D. K., & Nurcahyo, R. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Event Organizer Berbasis Digital Marketing. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45–55.
- Yuliani. (2022). Kesiapan Guru dalam Menghadapi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 233–245.